



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA BADAN
PELAKSANA OLEH DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)
Nomor: B. 10003/BPKH/BP/A7.4/05/2023**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

- Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Badan Pelaksana oleh Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Ruang Lingkup Pekerjaan : Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:
1. Menyusun indikator kinerja: Tim penyusun pedoman akan menentukan indikator kinerja yang relevan dan spesifik untuk digunakan dalam penilaian kinerja Badan Pelaksana BPKH. Indikator kinerja tersebut harus dapat diukur secara objektif dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja Badan Pelaksana BPKH dalam pengelolaan dana haji;
 2. Menyusun metode penilaian: Tim penyusun pedoman akan menentukan metode penilaian yang tepat untuk digunakan dalam penilaian kinerja Badan Pelaksana BPKH. Metode penilaian tersebut harus memungkinkan dewan pengawas untuk mengukur kinerja BPKH secara objektif dan terukur;
 3. Menyusun tindakan perbaikan: Tim penyusun pedoman akan menentukan tindakan perbaikan yang dapat dilakukan apabila terdapat kekurangan atau kelemahan dalam kinerja Badan Pelaksana BPKH. Tindakan perbaikan tersebut harus praktis dan dapat dilaksanakan oleh BPKH untuk meningkatkan kinerjanya;
 4. Memeriksa terhadap dokumen: Tim penyusun pedoman akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kinerja Badan Pelaksana BPKH, seperti laporan keuangan dan laporan tahunan, untuk menentukan indikator kinerja yang relevan dan metode penilaian yang tepat;
 5. Membuat laporan: Setelah penyusunan pedoman penilaian kinerja selesai, tim penyusun pedoman akan membuat laporan yang berisi panduan dan pedoman penilaian kinerja BPKH yang telah disusun. Laporan tersebut akan menjadi pedoman bagi dewan pengawas dalam melakukan penilaian kinerja Badan Pelaksana BPKH.

- Kebutuhan Ahli/Personil Tenaga : 3 (tiga) orang Tenaga Ahli, dengan kualifikasi:
- 1) *Project Manager* (Ketua Tim)
 - (a) Pendidikan minimal S3 jurusan Hukum atau Keuangan;
 - (b) Memiliki minimal 2 (dua) kali pengalaman pembuatan Pedoman Penilaian Kinerja pada lembaga Keuangan dengan bukti berupa SPK/PKS pada Lembaga Keuangan Pemerintah/ Swasta atau Regulator Keuangan di Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2018-2023);
 - (c) Berpengalaman minimal 8 (delapan) tahun di bidang Hukum/Keuangan.
 - 2) Analis Hukum (Anggota Tim)
 - (a) Pendidikan minimal S2 Jurusan Hukum/Ekonomi/Manajemen;
 - (b) Pengalaman min. 2 tahun sebagai konsultan Hukum.
 - 3) Analis Keuangan (Anggota Tim)
 - (a) Pendidikan minimal S2 jurusan Keuangan/Akuntansi;
 - (b) Pengalaman min. 2 tahun sebagai konsultan pengawasan (audit) keuangan.
- Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya : Pengadaan ini terbatas hanya untuk Pelaku Usaha yang berbentuk Badan Usaha, dengan syarat memiliki izin usaha sebagai jasa konsultansi dengan Kategori/Kode KBLI 70209 (Jasa Konsultansi Manajemen Lainnya)
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 60 (enam puluh) hari kalender
- Keluaran (*Output*) : 1 (satu) paket dengan keluaran/*output* berupa dokumen pedoman Penilaian Kinerja Badan Pelaksana BPKH, dilengkapi dengan:
- a. 10 (sepuluh) eksemplar *Hardcopy* Pedoman Penilaian Kinerja Badan Pelaksana BPKH;
 - b. *Softcopy* Pedoman Penilaian Kinerja Badan Pelaksana BPKH;
 - c. *Softcopy* perhitungan *Excel* dan sejenisnya; dan
 - d. Bahan presentasi Powerpoint *hardcopy* sebanyak Sepuluh buah, termasuk *softcopy*.
- Perkiraan Maksimal Biaya : Rp249.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) sudah termasuk pajak, bea, retribusi, dan pungutan yang sah lainnya.

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, ***diwajibkan*** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> (Rincian Persyaratan Umum, *terlampir*) dan ***mengirimkan screen shot***

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui email divisi.pengadaan@bpkh.go.id paling lambat pada hari **Jumat, 12 Mei 2023 Pukul 10.00 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja Badan Pelaksana oleh Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)*, serta dilanjutkan dengan login di <https://eproc.bpkh.go.id/>.

Mengingat pengadaan.com adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal pengadaan.com yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menmpaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. **Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.**

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Rabu – Jum’at, 10 – 12 Mei 2023	Rabu, 11.00 WIB	Jumat, 10.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Rabu – Jum’at, 10 – 12 Mei 2023	Rabu, 11.00 WIB	Jumat, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Jum’at – Selasa, 12 – 16 Mei 2023	Jum’at, 17.00 WIB	Selasa, 14.00 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Selasa - Rabu, 16 - 17 Mei 2023	Selasa, 14.01	Rabu, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Jumat, 19 Mei 2023	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Mei 2023

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

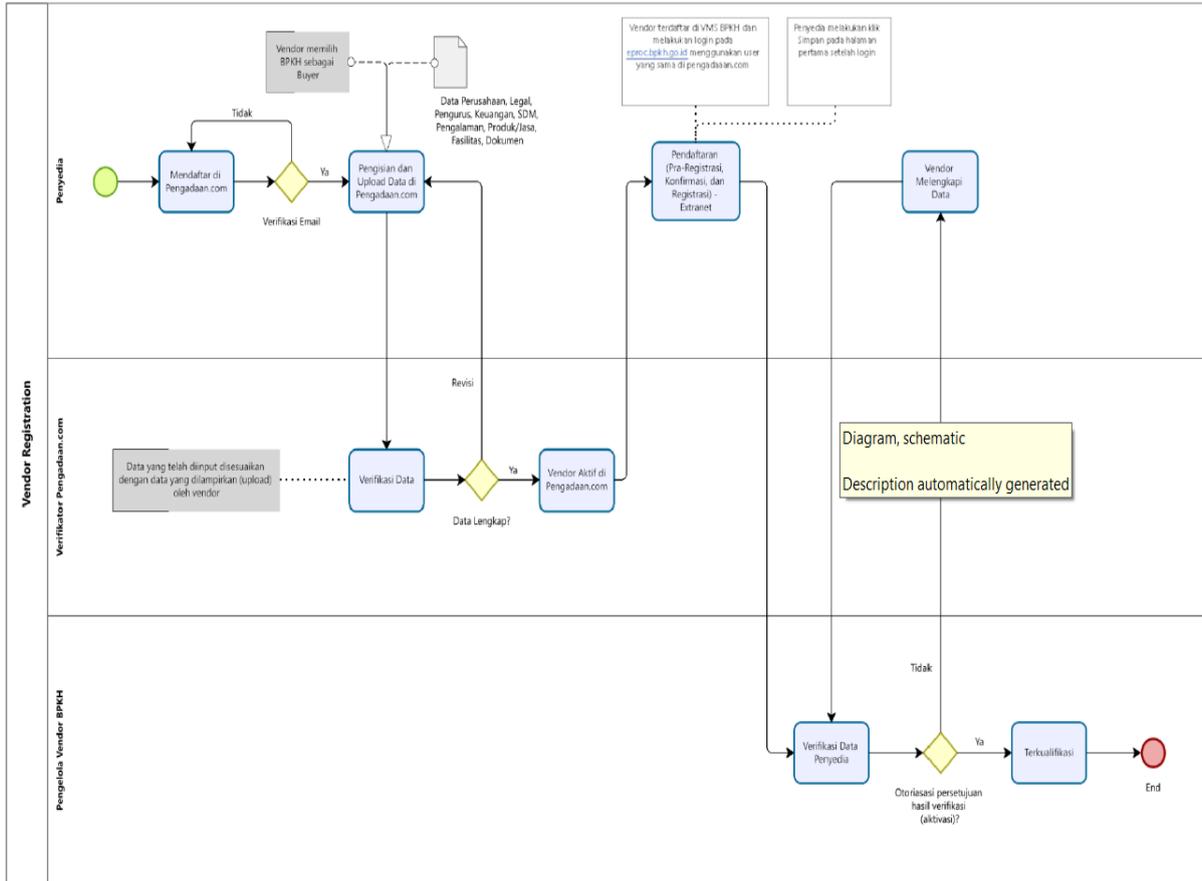
Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 10003/BPKH/BP/A7.4/05/2023

Tanggal : 10 Mei 2023

Alur Pendaftaran dan Persyaratan umum untuk mendaftar di portal pengadaan.com dimaksud, sebagai berikut:



Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas - Chamber of Commerce Business Register						V	V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisili	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP				V			
		- Kartu ID PERADI					V		
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan						V	
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)							V
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI					V		
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN						V	
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)							V
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN PERSONAL - WAJIB									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUJK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.